



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutkan dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkannya.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Umum yang ditetapkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Sistem Informasi Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan membagikan ADD; dan
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan rincian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. pelaporan ADD.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN ADD Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Rp88.951.106.000,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 yang dialokasikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Desa berdasarkan jumlah Perangkat Desa.
- (3) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjuk sebagai administrator Siskeudes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula dengan ketentuan:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Daerah

Pasal 9

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala Desa.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Tahap III dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling rendah ADD tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan membuat Berita Acara Kesepakatan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyaluran ADD tahap I akan dipotong iuran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa selama setahun.

Pasal 11

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Kepala urusan keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan penyaluran ADD; dan
 - d. pengurangan penyaluran ADD.

BAB VII
PELAPORAN ADD

Pasal 14

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati dengan ketentuan:

- a. tahap pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. tahap akhir paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
- c. laporan realisasi penggunaan ADD tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

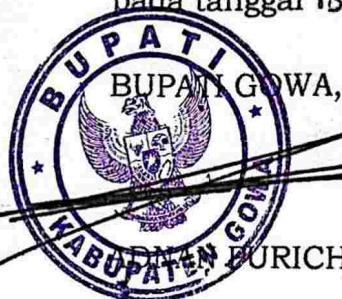
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Januari 2023



BURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bontonompo	Bontolangkasa Utara	644,009,053			62,545,600	706,554,640
2	Bontonompo	Bontolangkasa Selatan	644,009,053		6,900,000	51,929,000	702,838,053
3	Bontonompo	Barembeng	644,009,053			73,766,000	717,775,053
4	Bontonompo	Manjapai	644,009,053			64,067,000	708,076,053
5	Bontonompo	Bontobiraeng	644,009,053			52,982,000	696,991,053
6	Bontonompo	Romanglasa	644,009,053			63,205,000	707,214,053
7	Bontonompo	Katangka	644,009,053		13,800,000	51,149,000	708,958,053
8	Bontonompo	Bulogading	644,009,053			49,643,000	693,652,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
9	Bontonompo	Bategulung	644,009,053			37,325,000	681,334,053
10	Bontonompo	Kalabarembeng	644,009,053	44,000,000	18,450,000	71,439,000	777,898,053
11	Bontonompo	Bontobiraeng Sela tan	644,009,053			45,347,000	689,356,053
12	Bajeng	Bontosunggu	644,009,053			75,488,000	719,497,053
13	Bajeng	Maccinibaji	644,009,053		50,000,000	48,900,000	742,909,053
14	Bajeng	Pa'Bentengang	644,009,053		50,000,000	91,675,000	785,684,053
15	Bajeng	Tangkebjeng	644,009,053		6,900,000	57,399,000	708,308,053
16	Bajeng	Maradekaya	644,009,053		14,900,000	82,285,000	741,194,053
17	Bajeng	Panciro	644,009,053		8,250,000	65,478,000	717,737,053
18	Bajeng	Lempangang	644,009,053	40,000,000		76,670,000	760,679,053
19	Bajeng	Bone	644,009,053		39,600,000	68,076,000	751,685,053
20	Bajeng	Pannyangkalang	644,009,053		39,500,000	90,176,000	773,685,053
21	Bajeng	Paraikatte	644,009,053		28,300,000	45,473,000	717,782,053
22	Tompobullu	Garing	644,009,053		102,600,000	76,233,000	822,842,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
23	Tompobullu	Datara	644,009,053		30,000,000	88,631,000	762,640,053
24	Tompobullu	Rappolemba	644,009,053	24,000,000	-	147,293,000	815,302,053
25	Tompobullu	Rappoala	644,009,053			82,677,000	726,686,053
26	Tompobullu	Tanete	644,009,053	-	59,850,000	112,045,000	815,904,053
27	Tompobullu	Bontobuddung	644,009,053		13,750,000	69,769,000	727,528,053
28	Tinggimoncong	Parigi	644,009,053			84,810,000	728,819,053
29	Parangloe	Lonjoboko	644,009,053	20,000,000		94,674,000	758,683,053
30	Parangloe	Borisallo	644,009,053			107,219,000	751,228,053
31	Parangloe	Belapunranga	644,009,053			55,839,000	699,848,053
32	Parangloe	Bontokassi	644,009,053			82,808,000	726,817,053
33	Parangloe	Belabori	644,009,053			64,149,000	708,158,053
34	Bootomaranpu	Pakatto	644,009,053	24,000,000		67,755,000	735,764,053
35	Bootomaranpu	Nirannuang	644,009,053		14,850,000	43,752,000	702,611,053
36	Bootomaranpu	Romangloe	644,009,053			54,161,000	698,170,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
37	Bontomarannu	Sokkolia	644,009,053			69,438,000	713,447,053
38	Bontomarannu	Mata Allo	644,009,053		15,000,000	40,621,000	699,630,053
39	Bontomarannu	Bili-Bili	644,009,053			30,994,000	675,003,053
40	Palangga	Bontoala	644,009,053			130,904,000	774,913,053
41	Palangga	Pallangga	644,009,053			97,755,000	741,764,053
42	Palangga	Julubori	644,009,053	-		70,298,000	714,307,053
43	Palangga	Kampili	644,009,053			84,922,000	728,931,053
44	Palangga	Panakkukang	644,009,053			92,435,000	736,444,053
45	Palangga	Bontoramba	644,009,053			81,361,000	725,370,053
46	Palangga	Jene'Tallasa	644,009,053			140,460,000	784,469,053
47	Palangga	Julukanaya	644,009,053			74,574,000	718,583,053
48	Palangga	Julupa'Mai	644,009,053			42,552,000	686,561,053
49	Palangga	Bungaejaya	644,009,053			67,294,000	711,303,053
50	Palangga	Toddotoa	644,009,053		7,450,000	57,410,000	708,869,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
51	Palangga	Taeng	644,009,053	48,000,000		119,618,000	811,627,053
52	Bungaya	Bontomanai	644,009,053		14,700,000	59,663,000	718,372,053
53	Bungaya	Buakkang	644,009,053		37,250,000	75,130,000	756,389,053
54	Bungaya	Bissoloro	644,009,053	20,000,000		71,159,000	735,168,053
55	Bungaya	Rannaloe	644,009,053		31,400,000	55,590,000	730,999,053
56	Bungaya	Mangempang	644,009,053		39,500,000	56,000,000	739,509,053
57	Tombolopao	Ta'Binjai	644,009,053			90,779,000	734,788,053
58	Tombolopao	Erelembang	644,009,053		17,100,000	117,995,000	779,104,053
59	Tombolopao	Kanreapia	644,009,053		57,200,000	85,459,000	786,668,053
60	Tombolopao	Pao	644,009,053			91,117,000	735,126,053
61	Tombolopao	Balassuka	644,009,053		22,350,000	90,876,000	757,235,053
62	Tombolopao	Mamampang	644,009,053		6,900,000	80,821,000	731,730,053
63	Tombolopao	Tonasa	644,009,053	32,000,000	17,100,000	79,687,000	772,796,053
64	Tombolopao	Bolaromang	644,009,053			67,031,000	711,040,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
65	Biringbulu	Taring	644,009,053		209,600,000	75,536,000	929,145,053
66	Biringbulu	Pencong	644,009,053			102,360,000	746,369,053
67	Biringbulu	Berutallasa	644,009,053		36,050,000	123,476,000	803,535,053
68	Biringbulu	Parangloe	644,009,053		57,200,000	80,596,000	781,805,053
69	Biringbulu	Baturappe	644,009,053		50,000,000	75,594,000	769,603,053
70	Biringbulu	Batumalonro	644,009,053	36,000,000		78,980,000	758,989,053
71	Biringbulu	Borimasunggu	644,009,053			72,739,000	716,748,053
72	Biringbulu	Lembangloe	644,009,053		37,200,000	66,244,000	747,453,053
73	Biringbulu	Julukanaya	644,009,053			78,883,000	722,892,053
74	Barombong	Kanjilo	644,009,053	20,000,000		108,822,000	772,831,053
75	Barombong	Moncobalang	644,009,053			81,821,000	725,830,053
76	Barombong	Tinggimae	644,009,053			61,567,000	705,576,053
77	Barombong	Biringala	644,009,053		23,700,000	45,895,000	713,604,053
78	Barombong	Tamannyeleng	644,009,053	-		73,319,000	717,328,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
79	Pattalasang	Timbuseng	644,009,053			86,487,000	730,496,053
80	Pattalasang	Pallantikang	644,009,053			85,209,000	729,218,053
81	Pattalasang	Sunggumanai	644,009,053			56,680,000	700,689,053
82	Pattalasang	Pacellekang	644,009,053			89,798,000	733,807,053
83	Pattalasang	Pattallassang	644,009,053	32,000,000	50,000,000	64,957,000	790,966,053
84	Pattalasang	Je'Nemadinging	644,009,053			67,782,000	711,791,053
85	Pattalasang	Panaikang	644,009,053		47,600,000	45,232,000	736,841,053
86	Pattalasang	Borongpala'La	644,009,053			56,995,000	701,004,053
87	Manuju	Manuju	644,009,053			81,450,000	725,459,053
88	Manuju	Pattalilikang	644,009,053		8,000,000	70,660,000	722,669,053
89	Manuju	Tamalatea	644,009,053		6,350,000	65,200,000	715,559,053
90	Manuju	Moncongloe	644,009,053		50,000,000	45,436,000	739,445,053
91	Manuju	Bilalang	644,009,053	28,000,000		44,719,000	716,728,053
92	Manuju	Tassese	644,009,053			76,468,000	720,477,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
93	Manuju	Tana Karaeng	644,009,053			42,768,000	686,777,053
94	Bontolempangang	Julumate'Ne	644,009,053	32,000,000		52,924,000	728,933,053
95	Bontolempangang	Bontolempangang	644,009,053		750,000	58,494,000	703,253,053
96	Bontolempangang	Lassa-Lassa	644,009,053			55,600,000	699,609,053
97	Bontolempangang	Bontoloe	644,009,053			77,248,000	721,257,053
98	Bontolempangang	Pa'Ladingang	644,009,053		18,750,000	75,687,000	738,446,053
99	Bontolempangang	Paranglompoa	644,009,053		14,900,000	58,333,000	717,242,053
100	Bontolempangang	Bontotangga	644,009,053			53,864,000	697,873,053
101	Bontolempangang	Ulujiangang	644,009,053			41,632,000	685,641,053
102	Bontonompo Selatan	Sengka	644,009,053			91,509,000	735,518,053
103	Bontonompo Selatan	Tanrara	644,009,053		6,900,000	124,613,000	775,522,053
104	Bontonompo Selatan	Tindang	644,009,053	32,000,000		105,270,000	781,279,053
105	Bontonompo Selatan	Pa'Budukang	644,009,053			81,347,000	725,356,053
106	Bontonompo Selatan	Bontosunggu	644,009,053			78,637,000	722,646,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
107	Bontonompo Selatan	Salajangki	644,009,053			87,010,000	731,019,053
108	Bontonompo Selatan	Salajo	644,009,053		6,350,000	42,169,000	692,528,053
109	Bontonompo Selatan	Jipang	644,009,053		36,500,000	103,353,000	783,862,053
110	Parigi	Majannang	644,009,053	24,000,000	44,450,000	50,716,000	763,175,053
111	Parigi	Jonjo	644,009,053		41,400,000	68,937,000	754,346,053
112	Parigi	Manimbahoi	644,009,053		50,000,000	81,253,000	775,262,053
113	Parigi	Sicini	644,009,053		50,000,000	64,586,000	758,595,053
114	Parigi	Bilanrengi	644,009,053			58,310,000	702,319,053
115	Bajeng Barat	Borimatangkasa	644,009,053			55,938,000	699,947,053
116	Bajeng Barat	Mandalle	644,009,053			62,898,000	706,907,053
117	Bajeng Barat	Manjalling	644,009,053			68,801,000	712,810,053
118	Bajeng Barat	Gentungang	644,009,053		24,000,000	105,109,000	773,118,053
119	Bajeng Barat	Tanabangka	644,009,053		13,600,000	68,416,000	726,025,053
120	Bajeng Barat	Kalemandalle	644,009,053			69,500,000	713,509,053

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Jumlah Perangkat Desa	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
121	Bajeng Barat	Bontomanai	644,009,053	28,000,000		68,508,000	740,517,053
Total			77,925,095,400	484,000,000	1,646,900,000	8,895,110,600	88,951,106,000


BUPATI GOWA,
ADM. PURICHTA ICHSAN YL